



## Pemprov Kalbar Raih WTP Dengan Paragraf Penjelasan

PONTIANAK-RK. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun anggaran 2013 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan. Predikat tersebut masih sama seperti tahun sebelumnya.

"Hal yang menjadi catatan dalam laporan hasil pemeriksaan adalah terkait masih adanya informasi yang belum lengkap mengenai lokasi, luas serta status tanah untuk gedung dan bangunan," kata Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Didi Budi Satrio saat menyerahkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Kalbar di Balairungsari, gedung DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (21/8). Namun Didi menilai, hal tersebut tidak secara material mempengaruhi penyajian aset tetap gedung dan bangunan pada laporan.

Adapun neraca Pemprov Kalbar per 31 Desember 2013 menyajikan total aset sebesar Rp4,85 triliun. Kewajiban sebesar Rp106,73 miliar dan ekuitas sebesar Rp4,74 triliun. Sedangkan realisasi anggaran yang berakhir 31 Desember 2013 untuk Anggaran Pendapatan Daerah Rp3,31 triliun dengan realisasi sebesar Rp3,26 triliun, anggaran belanja daerah sebesar Rp3,47 triliun dengan realisasi Rp3,30 triliun termasuk transfer bagi hasil ke kabupaten/kota.

"Pembiayaan netto dianggarkan sebesar Rp162,04 miliar direalisasikan seluruhnya 100 persen, dengan jumlah pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, maka sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp127,75,"



Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Didi Budi Satrio menyerahkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Kalbar kepada Gubernur Kalbar Cornelis di Balairungsari, gedung DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (21/8). ANDREAS

papar Didi.

Ia berharap, LHP yang telah disampaikan dapat dimanfaatkan oleh para pimpinan dan anggota dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya.

"Dan sesuai undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, gubernur beserta jajarannya diharapkan segera menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI, selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima," ungkapnya.

Sementara Sub Direktorat II Audit BPK RI Perwakilan Kalbar Joni Rindra Putra menjelaskan, tempo 60 hari yang diberikan BPK untuk menindaklanjuti hasil LHP tersebut tidak bersifat baku.

"Nanti akan kita lihat seperti apa perbaikannya, harusnya tetap pemprov proses dalam

60 hari ke depan. Progressnya bagaimana. Namun 60 hari itu tidak harus selesai, minimal ada progressnya, karena permasalahan aset bentuk tanah itu tidak bisa secepatnya," papar Joni Rindra.

Menurutnya, jika tidak diselesaikan, aset Pemda bisa bermasalah bahkan hilang. Untuk itu Pemprov Kalbar harus secepatnya mendata aset-aset yang belum terdata dengan lengkap itu.

Namun Joni enggan menyebutkan rincian aset di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan pemprov Kalbar yang belum didata.

"Ada beberapa, cuma kalau luasannya kita belum tahu. Tujuan kita sebagai pemeriksa untuk memberikan rekomendasi. Sehingga pengelola keuangan pemerintah daerah ini bisa lebih bagus," ungkap Joni. Gubernur Kalbar Drs Corne-

lis MH mengaku belum puas terhadap predikat Opini WTP yang diraih Kalbar tahun ini, sebab masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki dalam laporan, terutama menyangkut pengelolaan aset daerah.

"Kita merasa belum puas, karena masih ada catatan-catatan, maunya kita tidak ada catatan. Catatan ini dalam jangka waktu 60 hari harus diselesaikan, kelirunya dimana, nanti akan kita cek," kata Cornelis.

Menurut dia, predikat opini WTP Kalbar tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan masalah aset yang berhubungan dengan pihak lain. Salah satu contoh tanah milik Pemprov Kalbar yang diduduki warga di Jeruju, Kecamatan Pontianak Barat itu.

"Ini jadi catatan. Penyelesaiannya bisa memakan waktu.

Kita harus meminta persetujuan Anggota Dewan, harus ada pendanaan, karena ini resiko keuangan. Bagaimana pendekatan dengan masyarakat. Jadi nggak segampang seperti kita ngomong," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Fisip Universitas Tanjungpura Pontianak, Jumadi P Hd mengungkapkan, diraihnya Opini WTP oleh Pemprov Kalbar menunjukkan komitmen pemerintah daerah menjalankan prinsip good governance atau tatakelola pemerintahan yang baik. Namun apabila predikatnya belum meningkat dari sebelumnya, perlu keseriusan Pemprov Kalbar bekerja, terutama menata aset daerah.

"Saya pikir dengan WTP tentu patut kita apresiasi, karena dengan opini seperti itu menunjukkan pengelolaan keuangan Pemprov Kalbar sudah berjalan dengan baik. Namun kalau pun ada beberapa catatan terkait dengan aset, tentu hal tersebut harus dijadikan cambuk bagi Pemprov Kalbar untuk lebih serius lagi melakukan perbaikan manajemen aset daerah," kata Jumadi.

Sehingga keberadaan aset pemprov Kalbar yang ada bisa dihimpun dan memiliki status yang jelas. "Karena ini milik negara. Maka kita berharap Pemprov Kalbar mengevaluasi sembari mengambil langkah-langkah yang lebih profesional untuk melakukan perbaikan seperti yang direkomendasikan BPK," ujar Jumadi.

Laporan : Andreas